

# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 35211

Bandar Lampung, Januari 2023

Yth. Kepada  
Kepala Perangkat Daerah  
Dilingkungan Pemerintah  
Provinsi Lampung  
di-  
Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor : 015.2 / 0179 / 10.01 / 2023

### TENTANG

### PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN PELAPORAN 2022 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/106/LHK.00.01/12/01/2023 Tanggal 10 Januari 2023 perihal Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2022, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh wajib lapor LHKPN Tahun Pelaporan 2022 dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung untuk segera Melaporkan Harta Kekayaannya melalui aplikasi *elhkpn.kpk.go.id* sampai dengan 30 Maret 2022 pukul 23.59 WIB;
2. Bagi Wajib Lapor LHKPN sampai dengan batas waktu 30 Maret 2022 belum melaporkan harta kekayaannya maka akan dikenakan sanksi tidak akan dibayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Bulan berjalan sampai dengan bulan berikutnya dan kepengurusan hak-hak kepegawaiannya ditunda sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 mengenai hukuman disiplin bagi wajib lapor yang tidak melaporkan harta kekayaannya;
3. Diminta kepada Saudara untuk melaporkan tidak lanjut pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Lampung melalui Inspektorat Provinsi Lampung.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

### SEKRETARIS DAERAH



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.  
Pembina Utama  
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan :

Gubernur Lampung di Teluk Betung (sebagai laporan)

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



Lampiran Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Tanggal : 16 Januari 2023  
Nomor : 015-2/0179/W.01/2023

## DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Inspektorat Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Prov.Lampung
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung
12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
13. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
22. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
23. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
25. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
27. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
28. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
29. Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung
30. Kepala Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung
31. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Lampung
32. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
33. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
34. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
35. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Lampung
36. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
37. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
38. Kepala Biro Pengadaan barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
39. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
40. Kepala Biro Adminitrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
41. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
42. Kepala Boro Prekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
43. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekreatriat Daerah Provinsi Lampung
44. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
45. Kepala Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
46. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek
47. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
48. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/106/LHK.00.01/12/01/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2022

10 Januari 2023

Yth. **Koordinator Unit Pengelola LHKPN  
Pemerintah Provinsi se-Indonesia  
(Terlampir)**

di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1590/SJ Tahun 2016 tentang Penegasan Kembali Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Merujuk ketentuan di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai amanat Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengingatkan kembali bahwa pelaporan harta kekayaan (LHKPN) per 31 Desember 2022 bagi para penyelenggara negara dan/atau wajib lapor, agar disampaikan **secara lengkap** paling lambat tanggal **31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB** melalui aplikasi [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
3. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pelaporan LHKPN merupakan cerminan ketaatan penyelenggara negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara, yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk memangku suatu jabatan publik;
4. Bersama surat ini kami juga meminta bantuan Bapak/Ibu untuk mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansi untuk segera menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2022 secara lengkap dan tepat waktu;
5. Dalam hal penyelenggara negara dan/atau wajib lapor tidak melaporkan harta kekayaannya sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Konfirmasi dan informasi, silakan menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) serta *call center* 198.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan  
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring  
u.b.  
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN,



Dokumen ini ditandatangani secara digital  
Isnaini

Tembusan Yth:

1. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK;
2. Inspektur KPK
3. Gubernur/Pj. Gubernur Pemerintah Provinsi se-Indonesia

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950

Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>

**Daftar Tujuan Surat**

1. Pemerintah Aceh
2. Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta
3. Pemerintah Provinsi Bali
4. Pemerintah Provinsi Banten
5. Pemerintah Provinsi Bengkulu
6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
7. Pemerintah Provinsi Gorontalo
8. Pemerintah Provinsi Jambi
9. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
10. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
11. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
13. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
14. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
15. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
16. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
17. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
19. Pemerintah Provinsi Lampung
20. Pemerintah Provinsi Maluku
21. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
22. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
23. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
24. Pemerintah Provinsi Papua
25. Pemerintah Provinsi Papua Barat
26. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
27. Pemerintah Provinsi Papua Tengah
28. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan
29. Pemerintah Provinsi Papua Selatan
30. Pemerintah Provinsi Riau
31. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
32. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
33. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
34. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
35. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
36. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
37. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
38. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. RW. Monginsidi No. 223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396  
TELUKBETUNG 35215

Bandar Lampung, 26 April 2023

Nomor : 900/ 460 /VI.01/Sek/2023  
Lamp. : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan LHKPN dan SPT Tahunan  
Tahun 2022

Kepada  
Yth. Inspektur Provinsi Lampung  
di Bandar Lampung

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 045.2/1195/IV.01/2023 tentang penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN) dan Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan daftar nama pegawai yang telah menyampaikan laporan LHKPN dan SPT Tahunan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum, terimakasih.

a.n. Kepala  
Sekretaris,

Dra. EVIE FATMAWATY, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690210 199001 2 001

DITERIMA

M

NICA 27/4/2023



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. R.W. Mongonsidi No.69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 35211

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan  
Pemerintah Provinsi Lampung  
di –

Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 045.2 / 1195 / 14.01 / 2023.

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi melalui pelaporan harta kekayaan sebagai upaya menjamin integritas dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Lampung, disampaikan hal sebagai berikut :

- a. Setiap Aparatur Negara memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara selanjutnya disebut dengan LHKAN.
- b. LHKAN adalah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
- c. Aparatur Negara terdiri dari :
  - ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - Anggota TNI
  - Anggota Polri
- d. Pelaksanaan pelaporan harta kekayaan yang telah berjalan selama ini dilakukan melalui penyampaian LHKPN untuk Penyelenggara Negara dan ASN Jabatan Tertentu, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan SPT Tahunan sebagai WPOP bagi ASN yang tidak wajib LHKPN.
- e. Terhitung mulai Tahun 2023 ASN yang tidak wajib LHKPN cukup menyampaikan pelaporan Informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan.
- f. Menugaskan APIP Pemerintah Provinsi Lampung untuk memantau dan melaporkan atas penyampaian SPT Tahunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung untuk selanjutnya disampaikan kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 30 April setiap tahun. Sehubungan dengan hal tersebut kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk menyampaikan rekap dan bukti laporan SPT Tahunan kepada Inspektorat Provinsi Lampung selambat-lambatnya minggu pertama bulan April setiap tahunnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 196410211990031008**

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Lampung di Telukbetung

**DAFTAR LAMPIRAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH
1	Inspektorat Provinsi Lampung
2	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
3	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
9	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung
11	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
13	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
17	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung
18	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
19	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
20	Dinas Sosial Provinsi Lampung
21	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
22	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
23	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
25	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
26	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
27	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
28	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
30	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
31	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
33	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
34	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
37	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
38	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung
39	Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
40	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung
41	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
42	Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
43	Biro Umum Setda Provinsi Lampung
44	Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung
45	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
46	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung
47	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
48	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Hi.Abdul Moeloek Provinsi Lampung



**LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA  
DAN SPT TAHUNAN 2022**



**BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2023**



**LAMPIRAN I : PENYAMPAIAN LHKPN TAHUN 2022**

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KET.
1	Ir. MULYADI IRSAN, M.T.	19670517 199303 1 011	IV	KEPALA BAPPEDA	Ada
2	Dra. EVIE FATMAWATY, M. Si	19690210 199001 2 001	IV	SEKRETARIS	Ada
3	Ir. AHMAD LIANURZEN, M.T.	19660701 199203 1 005	IV	KEPALA BIDANG	Ada
4	ANDRYA YUNILA HASTUTI	19670608 199203 2 006	IV	KEPALA BIDANG	Ada
5	EKA YUSLITA DEWI	19801101 200212 2 003	IV	KEPALA BIDANG	Ada
6	RIDWAN SAIFUDDIN	19740918 200902 1 002	IV	KEPALA BIDANG	Ada
7	BELLI PAHLUPI	19751223 200003 1 004	IV	KEPALA UPTB	Ada
8	HALOMOAN SINAGA	19630709 198712 1 004	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
9	MUHAMMAD YUSUF NASUTION	19671122 198903 1 003	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
10	IRMA NURACHMI	19720414 199703 2 003	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
11	ANDI ARAFAT	19740707 200212 1 008	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
12	DEWI SETIYAWATI	19740907 200212 2 004	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
13	AWLIYANTI	19760812 200312 2 001	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
14	DECKY FERDIANSYAH	19790819 200501 1 008	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
15	KAIZAN	19730323 200212 1 011	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
16	IDA SUSANTI	19741009 200604 2 005	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
17	MUHAMMAD ZAIMUDDIN AKBAR	19770222 200312 1 003	IV	FUNGSIONAL AHLI MADYA	Ada
18	MUJIYONO	19661228 199003 1 006	III	BENDAHARA	Ada



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MULYADI IRSAN  
NIK : 1871131705670007  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jabatan : KEPALA BADAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 13 Februari 2023

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-13 13:55:55



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : EVIE FATMAWATY

NIK : 1871025002690009

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Kerja : SEKRETARIAT

Jabatan : SEKRETARIS

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 15 Februari 2023

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkn@kpk.go.id](mailto:elhkn@kpk.go.id) | <https://elhkn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-15 15:21:58



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : AHMAD LIANURZEN  
NIK : 1871030107660065  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN  
KEWILAYAHAN  
Jabatan : KEPALA BIDANG  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 14 Februari 2023

tatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN.



rektorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-14 12:38:44

Yth. Sdr **ANDRYA YUNILA HASTUTI**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: ANDRYA YUNILA HASTUTI
<b>Jabatan</b>	: KEPALA BIDANG - BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN EVALUASI - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 08 Maret 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : EKA YUSLITA DEWI

NIK : 1871104111800001

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Kerja : BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan : KEPALA BIDANG

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 11 Februari 2023

**Catatan:**

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Yth. Sdr **RIDWAN SAIFUDDIN**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: RIDWAN SAIFUDDIN
<b>Jabatan</b>	: KEPALA BIDANG - BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 24 Februari 2023

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGAHA NEGARA**

Atas Nama : BELLI PAHLUPI

NIK : 1871132312750003

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Kerja : BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN MANUSIA

Jabatan : KEPALA BIDANG

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 2 Maret 2023

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-03-02 11:01:01



Dipindai dengan CamScanner



**KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav.  
4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: HALOMOAN SINAGA
<b>Jabatan</b>	: FUNGSIONAL MADYA - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 28 Maret 2023

Yth. Sdr **MHD.YUSUF NASUTION**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: MHD.YUSUF NASUTION
<b>Jabatan</b>	: KEPALA BIDANG - BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN EVALUASI - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

---

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : IRMA NURACHMI  
NIK : 1871055404720005  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jabatan : FUNGSIONAL MADYA  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 1 Februari 2023

catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN.



rektorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Surat ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ANDI ARAFAT

NIK : 1871100707740005

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jabatan : FUNGSIONAL MADYA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 8 Maret 2023

*Catatan:*

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr DEWI SETIYAWATI

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: DEWI SETIYAWATI
<b>Jabatan</b>	: FUNGSIONAL MADYA - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : AWLIYANTI

NIK : 1871025208760006

Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jabatan : FUNGSIONAL MADYA

Jenis Laporan : Periodik - 2022

Tanggal Kirim : 22 Maret 2023

**Catatan:**

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-03-22 02:13:39



Yth. Sdr **DECKY FERDIANSYAH**

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: DECKY FERDIANSYAH
<b>Jabatan</b>	: FUNGSIONAL MADYA - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2022

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Direktorat PP LHKPN KPK | [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) | [elhkpn.kpk.go.id](mailto:elhkpn.kpk.go.id) | Layanan LHKPN **198**

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : KAIZAN  
NIK : 1871032303730003  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jabatan : FUNGSIONAL MADYA  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 24 Maret 2023

**Catatan:**

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

.....  
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komis Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : IDA SUSANTI  
NIK : 1871034910740002  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jabatan : FUNGSIONAL MADYA  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 24 Maret 2023

**Catatan:**

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-03-24 11:37:21



Dipindai dengan CamScanner

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : MUJIYONO  
NIK : 1871112812660002  
Lembaga : PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Sub Unit Kerja : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Jabatan : BENDAHARA  
Jenis Laporan : Periodik - 2022  
Tanggal Kirim : 30 Januari 2023

Catatan:


Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Verifikasi : 2023-02-28 16:53:52



**SPT TAHUNAN  
2022**

LAMPIRAN I : PENYAMPAIAN SPT PAJAK TAHUN 2022

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KET.
1	Ir. MULYADI IRSAN, M.T.	19670517 199303 1 011	IV	Kepala Badan	Ada
2	Dra. EVIE FATMAWATY, M. SI	19690210 199001 2 001	IV	Sekretaris	Ada
3	Ir. AHMAD LIANURZEN, M.T.	19660701 199203 1 005	IV	Kepala Bidang	Ada
4	ANDRYA YUNILA HASTUTI	19670608 199203 2 006	IV	Kepala Bidang	Ada
5	EKA YUSLITA DEWI	19801101 200212 2 003	IV	Kepala Bidang	Ada
6	RIDWAN SAIFUDDIN	19740918 200902 1 002	IV	Kepala Bidang	Ada
7	BELLI PAHLUPI	19751223 200003 1 004	IV	Kepala UPTB	Ada
8	HALOMOAN SINAGA	19630709 198712 1 004	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
9	MUHAMMAD YUSUF NASUTION	19671122 198903 1 003	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
10	IRMA NURACHMI	19720414 199703 2 003	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
11	ANDI ARAFAT	19740707 200212 1 008	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
12	DEWI SETYAWATI	19740907 200212 2 004	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
13	AWLIYANTI	19760812 200312 2 001	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
14	DECKY FERDIANSYAH	19790819 200501 1 008	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
15	KAIZAN	19730323 200212 1 011	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
16	IDA SUSANTI	19741009 200604 2 005	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
17	MUHAMMAD ZAIMUDDIN AKBAR	19770222 200312 1 003	IV	Fungsional Perencana Madya	Ada
18	DHARMA SAPUTRA	19750827 199603 1 002	IV	Sub Koordinator	Ada
19	PRAYUDI ARIBOWO	19760608 199511 1 001	IV	Sub Koordinator	Ada
20	MUHAMMAD FAUZI	19750921 200501 1 004	IV	Sub Koordinator	Ada
21	MERYLIA	19800316 200212 2 004	IV	Sub Koordinator	Ada
22	CATUR MAKHMUDI	19760509 200604 1 007	IV	Sub Koordinator	Ada
23	YENI TRIDARMAYANTI	19751206 200003 2 002	IV	Analisis	Ada
24	WAHYU HIDAYAT	19760607 200604 1 011	IV	Analisis	Ada
25	AGUS GUNTUR SUKMONO	19660715 199201 1 001	III	Kasubbag Keuangan	Ada
26	ZAKIAH DRAJAT	19780520 200801 2 029	III	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Ada
27	DENY ANDRY	19780520 200801 2 029	III	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Ada
28	YULIANA	19801213 201101 1 002	III	Kasi Data Statistik	Ada
29	MUHAMMAD RIDUWAN PASRA	19781230 200903 2 002	III	Kasubbag Tata Usaha UPTD	Ada
30	SALISIARA	19821024 201001 1 012	III	Kasi Data Spasial	Ada
31	NAOMI SETYAWATI	19680516 199503 2 003	III	Sub Koordinator	Ada
32	ERA JAYANTI	19771014 200312 2 005	III	Sub Koordinator	Ada
33	HARYO WICAKSONO	19860329 200602 2 002	III	Sub Koordinator	Ada
34	SILFA GUSMAN	19760307 201001 1 007	III	Sub Koordinator	Ada
35	RIYA SONETA	19820825 201001 1 017	III	Sub Koordinator	Ada
36	RATNI PUSPA DEWI	19840617 201001 2 005	III	Sub Koordinator	Ada
37	LOLA AFRIYANA SYA'YAN	19690713 199703 2 001	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
38	TITA NOVITA	19770426 200902 2 001	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
39	LOKOSMI SABA OCDITA	19791101 200312 2 007	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
40	RATIH WIDIYANTI	19780517 200902 2 001	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
41	ANDRI BUDHI DHARMA	19821229 200212 2 002	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
42	RAHMIYANITA HAKIM	19840820 201001 1 013	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
43	YUNITA DEWI	19880108 200902 2 003	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
44	SINTHA AGUSTIANI	19800613 200501 2 006	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
45	MIRAYA DARDANI	19800809 201001 2 012	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
46	DIAN RAHMAWATI	19880910 200701 2 002	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
47	NELLY ASTUTI	19791025 201001 2 018	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
48	SYAIFUL RAHMAT	19800927 201101 2 002	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
49	REVARIO OKTANO	19811225 201001 1 022	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
50	DIELLA DWI SARTIKA	19831009 201001 1 010	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
		19860329 201101 2 007	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KET.
					Ada
51	ARIF LUQMAN AFFANDI	19840711 201402 1 001	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
52	M. ROBY SATRIA PRATAMA	19860113 201101 1 009	III	Fungsional Perencana Ahli Muda	Ada
53	GLADYTHA GUNAWAN	19940127 201507 2 001	III	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Ada
54	RITA MUSTIKA SARI	19920613 201902 2 005	III	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Ada
55	RATIH AULIA RAHMAYANTI	19841103 201101 2 009	III	Fungsional Surveyor	Ada
56	ANDI ZULFIKAR	19680601 198611 1 001	III	Analisis	Ada
57	ERLI KAROLI	19661205 198903 1 007	III	Analisis	Ada
58	AHMAD AMRULLAH	19710823 200212 1 002	III	Analisis	Ada
59	AMRULLAH KURNIAWAN	19720711 200604 1 011	III	Pengelola	Ada
60	SYAHRIL JAYA SAPUTRA	19710722 200903 1 001	III	Penyusun	Ada
61	ANDRE VICTOR MUCHSIN	19760307 201001 1 008	III	Analisis	Ada
62	YUDI ASTARI	19760626 201001 1 010	III	Penyusun	Ada
63	YENNY FITRIANI	19810610 201001 2 019	III	Analisis	Ada
64	AUDI KURNIAWAN	19820812 201001 1 012	III	Analisis	Ada
65	EVA MEFRIDA WATI	19850527 201001 2 007	III	Penyusun	Ada
66	SUAIB	19650301 199003 1 005	III	Pengadministrasi	Ada
67	YAYAK PRAWOTO	19651010 199003 1 010	III	Penyusun	Ada
68	AHMAD KOSASIH	19740814 200112 1 001	III	Pengelola	Ada
69	ARIESCO OKTAVIAN	19761031 201212 1 001	III	Analisis	Ada
70	RADIUS PRAWIRA NEGARA	19780831 200501 1 006	III	Analisis	Ada
71	RIKA YUNIATI	19820625 201101 2 007	III	Penyusun	Ada
72	MUHAMAD AIRLANGGA	19751130 201101 1 002	III	Analisis	Ada
73	KORNELA RESTIANTI	19810125 200804 2 002	III	Penyusun	Ada
74	ANDYITA PRATIWI	19870428 201101 2 011	III	Analisis	Ada
75	RIA LIZA NOVITA TH	19871113 201101 2 010	III	Analisis	Ada
76	DEDY APRIZAL	19841230 201503 1 001	III	Analisis	Ada
77	DAHIA RAHMAWATI	19850919 201402 2 001	III	Analisis	Ada
78	HEFRIZAL GHAZALI	19880809 201206 1 001	III	Analisis	Ada
79	DESSY ANGGRAHITA	19890709 201402 2 008	III	Analisis	Ada
80	PURIATMA NUR UTOMO	19921120 201408 1 001	III	Analisis	Ada
81	KARTINI	19730430 200701 2 007	III	Analisis	Ada
82	RIA PRIMADEKA	19850806 201001 2 018	III	Pengadministrasi	Ada
83	SABARUDIN BAKIS	19650911 198709 1 001	III	Pengadministrasi	Ada
84	SRI HARYATI	19660512 198912 2 003	III	Pengadministrasi	Ada
85	SADIMIN	19660907 198903 1 004	III	Pengadministrasi	Ada
86	MUJIYONO	19661228 199003 1 006	III	Pengadministrasi	Ada
87	BAMBANG ERY SUGIHONO	19680917 199303 1 003	III	Pengadministrasi	Ada
88	MALIK SYARIFUDIN	19690508 200701 1 014	III	Penyusun	Ada
89	BERTHA MIRZALIA	19811025 201001 2 002	III	Penyusun	Ada
90	NAFIAH PRATIWI	19840409 201001 2 019	III	Pengelola	Ada
91	FIRZA HANGGARA	19850627 201101 1 006	III	Penyusun	Ada
92	SITI MASITOH	19840706 201503 2 001	III	Analisis	Ada
93	YULIA FITRI	19870615 201503 2 002	III	Analisis	Ada
94	RIZKI WINANDA	19900608 201503 1 004	III	Analisis	Ada
95	RIMA BUDI ARISTA	19920719 201503 2 002	III	Penyusun	Ada
96	DHANIA APISHA	19930314 201609 2 001	III	Analisis	Ada
97	INTAN SARI AMSYA	19930314 201609 2 001	III	Pengelola	Ada
98	BELLA RAYENDRA HIPPI	19810915 201001 2 010	III	Penyusun	Ada
99	ANDRE NUGRAHA PUTRA	19920211 201503 2 002	III	Analisis	Ada
100	AKHMAD RODI	19980921 202108 1 002	III	Pengadministrasi	Ada
101	NIA WULAN SARI	19740705 200701 1 015	II	Pengadministrasi	Ada
		19780628 200701 2 015	II	Pengadministrasi	Ada

No.	NAMA	NIP	GOL.	JABATAN	KET.
102	ICHSAN RIZKI SETIAWAN	19790326 200604 1 004	II	Pengelola	Ada
103	HALIJATUS SAKDIYAH	19800509 201001 2 003	II	Pengadministrasi	Ada
104	NASARUDDIN	19740212 200903 1 002	II	Pengadministrasi	Ada
105	SUGIMAN	19720809 200701 1 020	II	Pengadministrasi	Ada
106	JAUHARI	19700123 200701 1 006	II	Pengadministrasi	Ada
107	BURHAN	19720609 200701 1 025	II	Pengadministrasi	Ada
108	LANGGENG BASUKI	19840101 201212 1 003	II	Pengadministrasi	Ada
109	SUHERMAN	19791204 200701 1 003	II	Pengadministrasi	Ada
110	ANSORI	19650510 200701 1 050	I	Pengadministrasi	Ada



**[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

From: efilina@najak.go.id

1/19/23, 7:54 AM

Gmail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik



Sespri Bappeda &lt;sespribappedaprovlampung@gmail.com&gt;

**[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

1 message

e filing@pajak.go.id &lt;efiling@pajak.go.id&gt;

Thu, Jan 19, 2023 at 7:54 AM

To: sespribappedaprovlampung@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MULYADI IRSAN

NPWP : 085082683322000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 18/01/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : 73683106327238018741

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**PENTING**

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kopian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4